

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah program pembangunan global yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan potensi alam. Terdapat 17 tujuan dan 169 capaian atau target yang saling terkait, saling mempengaruhi, inklusif, dan terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, SDGs memiliki tiga pilar utama yaitu pembangunan, manusia, sosial, ekonomi dan lingkungan (Iskandar *et al.*, 2021).

Sustainable Development Goals (SDGS) disusun sebagai kelanjutan dari Millinium Development Goals (MDGs), yang akhirnya tercapai pada akhir tahun 2015. Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dalam tantangan global saat ini (Ishartono *et al.*, 2017).

Indonesia sebagai negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai kewajiban untuk mencapai target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya menjelaskan undang-undang ini ke tingkat desa dan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut dan mempercepat pencapaian target SDGs (Susanti et al., 2021).

Menurut (Pranoto et al., 2023) pembangunan berkelanjutan adalah sebuah paradigma dalam hal pembangunan perlu adanya pertimbangan mengenai keterlibatan serta kepentingan generasi yang akan datang. Keberhasilan sebuah pembangunan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dalam cakupan luas, yakni tidak hanya dari segi kuantitas melainkan juga dari segi kualitas. Pembangunan masyarakat pedesaan adalah upaya penting dari pembangunan otonomi daerah sebagai perwujudan dari tujuan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa. Tujuan utama pembangunan masyarakat pedesaan yakni mengatasi peningkatan urbanisasi masyarakat desa. Ruang lingkup sebuah pembangunan desa sangatlah luas karena hal ini mencakup seluruh pemenuhan kebutuhan melalui pembentukan masyarakat yang mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung pada hal-hal yang bersifat struktural sehingga nantinya kehidupan masyarakat desa akan lebih sejahtera (Mas et al., 2021). Bentuk kesuksesan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa juga merupakan bentuk sukses dari sistem pemerintahan di atasnya yakni pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, hal ini karena pembangunan pedesaan adalah bagian utama dari pembangunan nasional.

Meskipun desa merupakan ruang teritorial terkecil dan jumlah penduduknya relatif sedikit, namun terdapat banyak permasalahan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dihadapi yang juga menjadi masalah utama di desa. Angka kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dari pada di perkotaan (Susandini & Islam, 2022)

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa dinilai mempunyai potensi dan memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap

keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Iskandar, 2020). Menurut (Napitupulu et al., 2022) mengatakan bahwa kehadiran Sustainable Development Goals (SDGs) di pedesaan merupakan elemen penting bagi pemberdayaan masyarakat yang dapat membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang kerja yang layak.

(Larizza Dewanty Putri, et al. 2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Desa adalah upaya ekstensif dalam mewujudkan pembangunan desa yang menekankan bahwa seluruh masyarakat desa harus merasakan dan menikmati hasil dari manfaat SDGs.. Tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 yang terdapat 18 tujuan dan sasaran. Terwujudnya SDGs Desa tentunya perlu adanya penguatan sehingga dampaknya nanti akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Upaya penguatan SDGs Desa dapat dilakukan dalam bentuk program yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan aspek kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi (Sayuti et al., 2022). Salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi desa dan pembangunan berkelanjutan kawasan permukiman adalah dengan membangun kawasan pariwisata. Upaya ini sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-1 Desa Tanpa Kemiskinan, ke-8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, dan ke-18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif, yang menekankan pentingnya pengembangan potensi lokal dan pelestarian budaya melalui pemanfaatan sektor pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dimanfaatkan dalam program

pembangunan terutama di Indonesia, mengingat wilayah Indonesia kaya akan ekosistem alam dan budayanya. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor penyumbang devisa negara sehingga menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Fadisa et al., 2022).

Pariwisata menjadi bagian industri prioritas utama, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara di dunia. Negara Indonesia termasuk kepulauan yang mempunyai industri wisata yang positif juga menarik bagi wisatawan domestik hingga mancanegara (Trisnoasih, 2019). Keberadaan sektor pariwisata selain dapat mendongkrak pembangunan ekonomi juga dinilai dapat mendorong pembangunan melalui sektor lainnya seperti perdagangan dan perindustrian. Tabel 1.1 merupakan data kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2018-2024.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2018-2024 di Indonesia

Tahun	Jumlah Wisatawan
2018	15.810.305
2019	16.106.954
2020	4.052.923
2021	1.557.530
2022	5.889.031
2023	11.677.825 ($\pm$)
2024	13.902.420

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 ke 2019, mencapai puncaknya pada angka 16,1 juta. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada awal 2020 mengakibatkan penurunan drastis dalam dua tahun berturut- turut, yaitu 4 juta pada 2020 dan 1,5 juta pada 2021. Pada tahun 2022, mulai terlihat pemulihan

dengan jumlah kunjungan sebesar 5,8 juta. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan peningkatan hingga 11,6 juta kunjungan, dan pada tahun 2024 jumlah wisatawan mencapai 13,9 juta, bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan pemulihan sektor pariwisata yang kuat dan konsisten.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional serta mendukung pembangunan ekonomi di tingkat lokal, termasuk desa wisata. industri, lingkungan dan masyarakat lokal setempat serta dapat diaplikasikan pada semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Pariwisata dalam sebuah desa juga turut menjadi salah satu aspek dalam pengembangan potensi pariwisata dan budaya, yang di dalamnya terdapat kelompok kreatif sebagai aktor utama dalam membentuk desa kreatif.

Seiring berkembangnya pariwisata sebagai salah satu industri yang semakin pesat, tentunya tidak lepas dari adanya daya tarik di tempat wisata agar kunjungan wisatawan semakin meningkat (Taufik, 2022). Hal lain yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha objek wisata ditunjukkan dari

faktor-faktor yang mendukung pengembangan objek wisata meliputi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, atraksi, dan akomodasi (Noviyanti et al., 2017). Salah satu objek wisata yang dapat menjadi pilihan yaitu, wisata yang terdapat edukasi di dalamnya yaitu dapat diimplementasikan dalam program eduwisata.

Eduwisata atau biasa disebut dengan edukasi wisata adalah perjalanan wisata yang berfokus pada pemberian pengetahuan bagi pengunjung. Konsep dari

eduwisata ini adalah dengan memberikan nilai-nilai edukasi selain kepada pengunjung yang datang di wilayah tempat wisata juga kepada masyarakat (Marzaman & Rasyid, 2020). Program eduwisata pada dasarnya bertujuan memberikan pengalaman pembelajaran kepada pengunjung melalui interaksi langsung dengan lingkungan, budaya, atau aktivitas lokal. Selain mengenalkan destinasi wisata, eduwisata juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi unggulan desa, seperti produk kerajinan, kuliner, atau hasil alam. Dalam konteks ini, strategi branding sering digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual destinasi tanpa menghilangkan fungsi edukatif dari program tersebut.

Menurut (Aji et al., 2019) mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan sebagai wujud dari pengembangan eduwisata adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Pengembangan eduwisata dapat dilakukan dengan konsep CBT (Community Based Tourism) yakni pendekatan yang lebih terfokus pada masyarakat lokal dengan melibatkan peran dan aspirasi dari masyarakat, hal ini karena masyarakat lokal dianggap sebagai bagian dari destinasi wisata itu sendiri. Salah satu wilayah yang membangun eduwisata yaitu berada di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura.

Eduwisata Garam di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu destinasi wisata edukatif berbasis potensi lokal yang berkembang di Pulau Madura. Wisata ini tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar kepada pengunjung terkait proses produksi, pengolahan, dan pemanfaatan garam. Menurut (Sayuti et al., 2022) pengembangan wisata berbasis garam dapat mendorong industri garam lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, jumlah kunjungan ke Eduwisata Garam pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.027 pengunjung. Angka ini mencakup wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Desa Bunder sepanjang tahun tersebut. Meskipun tidak tersedia data kunjungan secara rinci per bulan, jumlah total tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai lebih dari 10.000 pengunjung hanya dalam kurun waktu delapan bulan. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi promosi yang lebih kuat, serta peningkatan kualitas layanan dan inovasi agar Eduwisata Garam tetap menarik bagi masyarakat dikutip dari Kabarmadura.id (2023)

Menurut (Fadisa et al., 2022) mengatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicapai pada periode sebelumnya. Artinya, pertumbuhan baru terjadi jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya pemerintah daerah yang berupaya untuk memperkuat kapasitas perekonomian masing-masing daerah di setiap sector.

Permasalahan kemiskinan di tingkat desa menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas perekonomian masing-masing wilayah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2024 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari

pengeluaran per kapita per bulan. Masyarakat dikatakan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan tingkat kabupaten digunakan sebagai pembanding awal sebelum dilakukan analisis mikro di tingkat desa, seperti Desa Bunder di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pulau Madura Tahun 2020–2024

Tahun	Bangkalan (ribu jiwa)	Sampang (ribu jiwa)	Pamekasan (ribu jiwa)	Sumenep (ribu jiwa)
2020	227,36	237,56	132,56	198,85
2021	215,57	229,16	126,78	190,64
2022	205,31	221,05	120,35	184,12
2023	–	–	126,43	–
2024	–	214,32	123,46	–

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Pamekasan (2020–2024)

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa Kabupaten Pamekasan mengalami tren penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, lalu turun kembali pada tahun 2024. Dengan persentase kemiskinan 13,41% pada 2024, Pamekasan menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Madura. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di tingkat desa, terutama Desa Bunder yang masih menghadapi tantangakemiskinan tinggi.

Menurut data SDGs Desa tahun 2023, indikator Desa Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1 SDGs) di Desa Bunder baru mencapai skor 35,51 dari skala 100. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara makro Pamekasan berhasil menurunkan kemiskinan, masih ada ketimpangan pada tingkat desa. Salah satu inisiatif yang dijalankan untuk mengatasi hal tersebut adalah pengembangan Eduwisata Garam oleh BUMDesa Mutiara Saghara.

Eduwisata Garam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya

Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi Merata), dan Tujuan 18 (Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Adaptif). Melalui pemberdayaan petani garam, pelatihan wisata edukatif, serta promosi produk lokal, program ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata menurun drastis dari 10.000 orang pada 2021 menjadi 1.027 orang pada 2023. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan dampak program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Eduwisata garam menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Desa Bunder. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, 2023), capaian skor SDGs Desa Bunder secara umum adalah sebesar 48,90 dari skala 0–100. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah tujuan SDGs belum tercapai secara optimal. Capaian lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1. 3 Capaian SDGs Desa Bunder Tahun 2023

No	Komponen	Capaian
1	Desa Tanpa Kemiskinan	35,51
2	Desa Tanpa Kelaparan	36,67
3	Desa Sehat dan Sejahtera	76,19
4	Pendidikan Desa Berkualitas	71,96
5	Keterlibatan Perempuan Desa	54,24
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	55,49
7	Desa Berenergi Bersih dan Tebarukan	99,76
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	35,29
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	77,13
10	Desa Tanpa Kesenjangan	35,83
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	49,00
12	Konsumsi & Produksi Desa Sadar Lingkungan	10,00
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0,00
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	50,00
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	3,33
16	Desa Damai Berkeadilan	77,91
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	42,76
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	69,14
Skor Capaian SDGs		48,90

Sumber: Kemendesa 2023

Tabel 1.3 menunjukkan capaian skor ideal setiap tujuan SDGs Desa seharusnya berada pada kisaran 75 hingga 100 poin agar dikategorikan “baik” atau “berhasil”. Namun, dari 18 tujuan SDGs Desa, terdapat lebih dari 10 indikator yang memiliki skor di bawah 50, bahkan beberapa di antaranya sangat rendah seperti: Desa Tanggap Perubahan Iklim (0,00), Peduli Lingkungan Darat (3,33), dan Produksi Sadar Lingkungan (10,00). Hal ini menjadi indikator bahwa banyak sektor masih membutuhkan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Melihat rendahnya skor capaian pada indikator “Desa Tanpa Kemiskinan” (35,51) dan “Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata” (35,29), maka sektor pariwisata - khususnya Eduwisata Garam - perlu dikembangkan secara maksimal sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan desa Eduwisata Garam tidak

hanya berpotensi menarik wisatawan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, memperkenalkan UMKM produk garam, serta memperkuat kelembagaan desa. Dengan manajemen yang inovatif dan kolaboratif, sektor ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan sekaligus alat percepatan pencapaian SDGs Desa.

Menurut Kemendesa (2023), semakin tinggi skor (mendekati 100), maka semakin tinggi pula keberhasilan pembangunan berkelanjutan di desa. Oleh karena itu, potensi lokal seperti eduwisata harus dijadikan keunggulan kompetitif dan dikelola secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pamekasan terdapat data tentang usaha dan produksi garam Kecamatan Pademawu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.4

Tabel 1. 4 Usaha dan Produksi Garam Kecamatan Pademawu tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Dasok	5	15,2	2.334
2	Bunder	26	115,9	8.785
3	Pademawu Timur	3	23,7	2.027
4	Tanjung	9	53,4	4.737
5	Padelegan	8	60,1	5.349
6	Majungan	8	80,1	7.105
7	Pagagan	4	19,1	1.759
8	Baddurih	4	22,6	1.361
Jumlah		36	336,4	33.457

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Desa Bunder menjadi desa dengan jumlah produksi garam terbesar kedua setelah Desa Manjungan. Sebagai penghasil garam terbesar di Kecamatan Pademawu, Desa Bunder ditetapkan sebagai “kampung garam”.

Desa Bunder merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu yang memiliki potensi alam melimpah jika dilihat dari sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan alam terbesar di Desa Bunder yakni potensi garam merupakan komoditas lokal unggulan yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi di Desa Bunder. Desa ini memiliki sekitar 62,26% lahan pertanian yang digunakan sebagai tambak garam (Wahyurini & Hamidah, 2020). Sayangnya, proses produksi garam masih bersifat tradisional, mulai dari pemanfaatan lahan yang belum maksimal, penggunaan teknologi yang rendah, hingga pengemasan dan pemasaran yang belum efisien. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai tambah produk serta tidak optimalnya kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Melihat potensi tersebut, pengembangan sektor garam seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kegiatan produksi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa berbasis SDGs. Sebagaimana ditegaskan oleh Kemendesa (2023), pembangunan desa yang berkelanjutan harus bertumpu pada potensi lokal yang dimiliki setiap desa, baik dari aspek sumber daya alam, budaya, maupun sosial-ekonomi. Dalam konteks Desa Bunder, pengembangan sektor garam sejalan dengan Tujuan 1 (Desa Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata) dalam SDGs Desa, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ekonomi keluarga berbasis lokal.

Sebagai bentuk pengelolaan potensi tersebut, Pemerintah Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mutiara Saghara pada tahun 2018, yang salah satu unit usahanya adalah Eduwisata Garam. Eduwisata ini dirancang untuk menggabungkan produksi

garam, kegiatan edukatif, dan pariwisata berbasis komunitas. Dengan penguatan kelembagaan desa melalui BUMDesa, program ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus akselerator pencapaian SDGs Desa secara berkelanjutan.(Wahyurini & Hamidah, 2020).

Di desa Bunder, Kecamatan Pademawu, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bernama Mutiara Saghara pada tahun 2018. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha yang didirikan oleh desa dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi desa. Ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kreatif dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pendapatan daerah. Pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan menjadikannya pilar demokrasi. Tujuan utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan potensi desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru (Napitupulu et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mengenai peran eduwisata garam di Desa Bunder dapat dilihat dari apa saja dan bagaimana program eduwisata garam dalam mengoptimalkan potensi desa untuk mencapai target SDGs desa. Sehingga dengan adanya pembangunan eduwisata garam maka dapat mengimplementasikan salah satu atau lebih dari 18 tujuan SDGs desa dalam mencapai target. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti SDGs desa dengan judul “Peran Eduwisata Garam Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (Studi Kasus Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas peneliti, yaitu

1. Apa program Eduwisata Garam yang berpotensi mencapai SDGs Desa di Desa Bunder?
2. Bagaimana peran program Eduwisata Garam terhadap pencapaian SDGs Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah yang dijabarkan di atas. Beberapa tujuan penelitian ini antara lain:

- 1 Untuk menganalisis program-program Eduwisata Garam yang berpotensi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa di Desa Bunder.
- 2 Untuk menganalisis peran program Eduwisata Garam dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa di Desa Bunder.

1.4 Mamfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi

1. Manfaat bagi peneliti: menambah wawasan dalam pengetahuan dan teori untuk disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat bagi pemerintah: hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau bahan evaluasi selanjutnya untuk merumuskan kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa khususnya dalam wisata edukasi.

Sehingga dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.